

Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Multietnik Malaysia dan Singapura

Serli Retno Sari

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Sherly.rsari@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di negara multietnik, yaitu di Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang sama-sama bekas jajahan Inggris, dan dalam populasinya terdapat tiga etnis utama yaitu China, Melayu dan India. Tulisan ini merupakan studi literatur dengan menggunakan metode komparasi dengan menganalisis 14 jurnal nasional dan internasional terkait pendidikan kewarganegaraan dan keberagaman di Malaysia dan Singapura. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keberagaman etnis di Malaysia dan Singapura. Namun demikian baik di Malaysia maupun di Singapura, Pendidikan Kewarganegaraan sama-sama memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis walau dalam keberagaman budaya, bahasa, agama dan adat istiadat.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, multietnik, multikultural, Malaysia, Singapura

ABSTRACT

This article discusses about the role of citizenship education in multi-ethnic countries, namely in Malaysia and Singapore. Malaysia and Singapore are two former British colonies, and in the population, there are three main ethnic groups namely China, Malay and India. This article is study of literature by using the comparative method by analyzing 14 national and international journals related to citizenship and diversity education in Malaysia and Singapore. Based on the results of this research, there is a difference in the management of ethnic diversity in Malaysia and Singapore. However, both in Malaysia and Singapore, citizenship education equally play an important role in creating a harmonious society even in the diversity of cultures, languages, religions and customs.

Keywords: citizenship education, multi-ethnic, multicultural, Malaysia, Singapura



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2018 by the author(s).

Received: April 23 2018

Revised: October 10 2018

Accepted: October 25 2018

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di negara multietnik, yaitu di Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini sama-sama terdiri dari tiga etnis utama yaitu China, Melayu dan India, namun dengan rasio yang berbeda. Di Malaysia rasionya adalah 50,4 % etnis Melayu, 23,7% China, 7,1% India, 11% masyarakat adat dan 7,8% etnis lainnya. Sementara di Singapura didominasi oleh China yaitu 74,1%, 13,4% Melayu, 9,2% India dan 3,3% etnis lainnya (Noor & Leong, 2013).

Keberagaman tersebut pada satu sisi merupakan suatu kekayaan dan kekuatan sosial dan akan terlihat indah apabila satu sama lain saling bersinergi dalam membangun bangsa. Namun di sisi lain keragaman tersebut dapat memicu terjadinya konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Keberagaman etnis akan mempengaruhi interaksi sosial sebab masing-masing etnis memiliki corak budaya, bahasa, agama dan adat istiadat yang berbeda. Masyarakat yang hidup dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi untuk saling membedakan dan mempolarisasi (N. M. Yusof, Abdullah, & Ahmad, 2014) .

Untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat majemuk seperti di Malaysia dan Singapura, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, patriotik dan demokratis (Bandu, Awang, & Ahmad, 2017). Menurut Balakrishnan (2015), sebagai negara multietnik, pendidikan kewarganegaraan di Malaysia bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman untuk mengenal dan menghormati budaya, norma dan cara hidup orang lain. Begitupun pendidikan kewarganegaraan di Singapura juga bertanggungjawab untuk mendukung keharmonisan dalam keberagaman serta berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat (Keong, 2013; Baildon, Baildon, Sim, & Paculdar, 2016).

Secara keseluruhan, komitmen dan rasa hormat Singapura terhadap keberagaman telah menjadi landasan terciptanya masyarakat yang harmonis, stabil, dan makmur. Namun berbeda hal dengan Malaysia. Selama bertahun-tahun kebijakan di Malaysia telah mempertajam terjadinya pengelompokan antar etnis. Hal ini menimbulkan kebencian orang non-Melayu terhadap orang Melayu. Mereka merasa terpinggirkan sehingga timbul ketidakadilan dan kekesalan kolektif di antara mereka terhadap kelompok etnik Melayu (Keong, 2013). Uraian di atas menunjukkan bahwa di Malaysia dan Singapura, sebagai negara yang sama-sama multietnik, ternyata memiliki perbedaan dalam implementasi kehidupan multikulturalnya. Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk menulis peranan pendidikan kewarganegaraan di negara multietnik, tepatnya di Malaysia dan Singapura.

METODE

Artikel ini merupakan studi literatur dengan menggunakan metode komparasi dengan mengambil sejumlah artikel mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menciptakan masyarakat yang multietnik di Malaysia dan Singapura. Sumber data dalam penelitian ini adalah 14 jurnal nasional dan internasional terindeks. Jurnal yang dijadikan sumber data adalah jurnal terbaru dengan batasan minimal tahun 2013. Dari studi literatur yang dilakukan, diperoleh komparasi seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Multietnisitas Malaysia dan Singapura

Aspek	Malaysia	Singapura
Sejarah	Munculnya masyarakat	Kedatangan Inggris pada abad
Multietnik	multietnik di Malaysia bermula	ke-18 mulanya menjadikan

	<p>dari masuknya orang China ke Malaya pada pertengahan abad ke-19 sebagai reaksi dari perluasan penambangan timah. Dalam waktu bersamaan, terbukanya lapangan pekerjaan baru akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi Inggris di tanah Melayu menjadi faktor penarik datangnya tenaga kerja dari luar dalam jumlah yang besar. Pada akhir abad ke-19 didirikannya industri penanaman karet, menjadi pemicu masuknya orang India ke tanah Melayu.</p>	<p>Singapura sebagai "rumah singgah" untuk isi ulang bahan makanan, memperbaiki serta menjaga armada kerajaan dan menekan kemajuan Belanda di wilayah Asia Tenggara. Kemudian Sir Stamford Raffles menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas ini menjadi faktor penarik banyaknya pedagang Asia dengan berbagai latar belakang etnis yang masuk ke Singapura</p>
Populasi Etnis	50,4% Melayu, 23,7% Cina, 11% masyarakat adat, 7,1% orang India, dan 7,8% ras lainnya.	74,1% Cina, 13,4% Melayu, 9,2% India dan 3,3% lainnya
Hubungan Antar Etnis	Digolongkan dalam keyakinan zero-sum dimana Melayu dominan lebih didukung	Multikulturalisme Singapura lebih menekankan pada kemandirian, keadilan dan kesetaraan dengan tidak diformulasikan dengan zero-sum
Sistem Pendidikan	Salah satu tujuan dari Kebijakan Pendidikan Nasional Malaysia adalah "untuk menanamkan dan memelihara kesadaran nasional melalui pengembangan cita-cita, nilai, aspirasi dan kesetiaan umum untuk dibentuk persatuan nasional dan identitas nasional dalam masyarakat multirasial"	Kurikulum pendidikan di Singapura bertujuan agar siswa dan lulusannya memiliki kesadaran antar budaya, partisipasi sosial, memiliki pengalaman transformatif, pembelajaran kolaboratif (agar siap berkerja dengan orang-orang berbeda budaya, untuk memecahkan masalah yang kompleks dan multidisipliner, serta memiliki kesadaran global
Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia dikenal dengan istilah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) dimulai sejak tahun 1972. Setelah kemerdekaan, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan	Pendidikan kewarganegaraan di Singapura memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen

memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Mulanya bertumpu pada struktur dan jenis kerajaan, namun kini menumpu pada kondisi masyarakat serta masa depan bangsa. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan berperan dalam memelihara integritas dalam masyarakat serta identitas negara.

untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai negara multietnik, pendidikan kewarganegaraan di Singapura juga bertanggung jawab untuk mendukung keharmonisan dalam keberagaman serta berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya masyarakat multietnik di Malaysia dan Singapura memiliki latar belakang yang tak jauh berbeda, yaitu sama-sama disebabkan oleh faktor ekonomi. Di Malaysia masuknya orang China pada pertengahan abad ke-19 bermula dari terjadinya perluasan penambangan timah. Dalam waktu bersamaan, terbukanya lapangan pekerjaan baru akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi Inggris di tanah Melayu menjadi faktor penarik datangnya tenaga kerja dari luar dalam jumlah yang besar. Pada akhir abad ke-19 didirikannya industri penanaman karet, menjadi pemicu masuknya orang India ke tanah Melayu (Changsong & Yiming, 2017; Mun, 2013). Sementara itu di Singapura kedatangan Inggris pada abad ke-18 mulanya menjadikan Singapura sebagai “rumah singgah” untuk isi ulang bahan makanan, memperbaiki serta menjaga armada kerajaan dan menekan kemajuan Belanda di wilayah Asia Tenggara. Kemudian Sir Stamford Raffles menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas ini menjadi faktor penarik banyaknya pedagang Asia dengan berbagai latar belakang etnis yang masuk ke Singapura (Keong, 2013).

Dalam pengelolaan keragaman etnis, di Malaysia berlaku pelabelan etnis Melayu, Cina, dan India, dan kategori politik pribumi dan non-pribumi. Terdapat hak istimewa khusus bagi kelompok pribumi yang tersedia melalui program tindakan afirmatif (Noor & Leong, 2013). Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan bentuk-bentuk kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Melayu merupakan etnis mayoritas dengan rasio 50,4 %, sementara selebihnya 23,7% China, 7,1% India, 11% masyarakat adat dan 7,8% etnis lainnya. Hubungan antar-kelompok di Malaysia digolongkan dalam keyakinan *zero-sum* dimana Melayu dominan lebih didukung dengan mengorbankan etnis yang tidak dominan (Noor & Leong, 2013). Nordin, Alias, & Siraj (2013) menambahkan bahwa hubungan antar etnis di Malaysia lebih rumit dan sensitif, terutama bila berkaitan dengan masalah agama, budaya dan bahasa. Terjadinya polarisasi akibat adanya ketidakpercayaan satu etnis terhadap etnis lainnya.

Berbeda dengan model Malaysia, kebijakan sosial di Singapura dalam pengelolaan keberagaman budaya justru mempertahankan setiap perbedaan. Agar tercipta keharmonisan, multikulturalisme Singapura lebih menekankan pada

kemandirian, keadilan dan kesetaraan. Pengelolaan keberagaman tidak diformulasikan dengan *zero-sum*. Di Singapura, wacana keanekaragaman budaya tidak lagi berpusat di ranah identitas rasial namun bagaimana masuknya imigran berpotensi mengubah struktur budaya bangsa (Noor & Leong, 2013). Singapura merupakan negara multietnik dengan tidak ada sejarah kebangsaan atau identitas nasional sebelumnya. Imigran di Singapura berasal dari seluruh Asia, terutama dari Cina, India, Indonesia dan Timur Tengah (Keong, 2013). Semua negara ini memiliki peradaban kuno yang berbeda satu sama lain sehingga memberi warna dalam keberagaman masyarakat di Singapura. Rasinya yaitu China 74,1%, 13,4% Melayu, 9,2% India dan 3,3% etnis lainnya (Noor & Leong, 2013). Rasio ini berpotensi munculnya kekuasaan politik oleh kelompok etnik mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak kelompok minoritas. Namun pemerintah Singapura tidak pernah membiarkan nilai-nilai politik ditentukan oleh sekelompok etnis saja (Keong, 2013).

Pada satu sisi, keberagaman merupakan suatu kekuatan sosial (*social power*) yang indah apabila antara satu dengan yang lainnya saling bersinergi, saling bekerja sama, hidup harmonis dan stabil untuk membangun suatu bangsa. Namun pada sisi lain keberagaman justru bisa menjadi ancaman. Keberagaman etnis akan mempengaruhi interaksi sosial sebab masing-masing etnis memiliki corak budaya, bahasa, agama dan adat istiadat yang berbeda. Masyarakat yang hidup dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi untuk saling membedakan dan mempolarisasi (N. M. Yusof et al., 2014). Apabila kemajemukan tersebut tidak dikelola dan dibina dengan baik maka akan memicu terjadinya konflik yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa (Triyono, 2017).

Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk menciptakan kesatuan dalam masyarakat multietnik. Di Malaysia, dalam rangka pembangunan bangsa, pemerintah berfokus pada pengembangan sistem pendidikan nasional yang dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Salah satu tujuan dari Kebijakan Pendidikan Nasional Malaysia adalah "untuk menanamkan dan memelihara kesadaran nasional melalui pengembangan cita-cita, nilai, aspirasi dan kesetiaan umum untuk dibentuk persatuan nasional dan identitas nasional dalam masyarakat multirasial" (Daud, 2016). Salah satu upaya pemerintah Malaysia dalam menciptakan keharmonisan bermasyarakat adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, kesatuan dan kesadaran nasional melalui mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Nordin et al., 2013).

Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia dikenal dengan istilah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) dimulai sejak tahun 1972 (Balakrishnan, 2015). Setelah kemerdekaan, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Mulanya bertumpu pada struktur dan jenis kerajaan, namun kini menumpu pada kondisi masyarakat serta masa depan bangsa. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan berperan dalam memelihara integritas dalam masyarakat serta identitas negara (Balakrishnan, 2015). Menurut D. M. Yusof, Zakariya, & Shahdan (2014) tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multi budaya yang demokratis adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang diperlukan dalam membuat keputusan reflektif serta berperan

aktif agar tercipta warga negara yang lebih demokratis, adil dan efektif dalam konteks global. Kewarganegaraan berarti memiliki identitas nasional, budaya dan global, yang bersifat kompleks, interaktif, dan kontekstual. D. M. Yusof et al. (2014) juga mengemukakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengatur serta memanfaatkan hal-hal positif dari globalisasi dan nasionalisme agar negara tersebut senantiasa berkembang dan stabil.

Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia bermuatan nilai-nilai multikulturalisme dan nasionalisme. Kurikulum tersebut mencakup perkembangan individu dan sosial, tanggung jawab sebagai individu terhadap keluarga, partisipasi masyarakat, membangun hubungan yang baik, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman, penghormatan terhadap hak orang lain, kontribusi terhadap pembangunan nasional serta nilai-nilai kemandirian dan harga diri. Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan juga berisikan bermuatan nilai-nilai yang mengarah agar tercipta warga negara yang melek politik dan melek hukum. Bagaimana menyatukan keberagaman melalui simbol-simbol nasional seperti bendera nasional, lagu kebangsaan nasional dan bahasa nasional (Balakrishnan, 2015). Malaysia dengan keragaman budayanya memberikan hak istimewa dan kebebasan dalam mempraktikkan budaya asli bagi setiap etnis. Agar tetap tercipta keharmonisan dalam hidup berbangsa, pendidikan sivik dan kewarganegaraan berperan dalam memberikan pemahaman untuk mengenal dan menghormati budaya, norma dan cara hidup orang lain (Balakrishnan, 2015). Antar warga negara harus saling menghormati budaya dan agama satu sama lain. Mereka harus memiliki kesadaran dalam mengembangkan kualitas yang baik dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sama halnya dengan Malaysia, pendidikan di Singapura memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dengan keberagaman budayanya. Pendidikan di Singapura bertujuan agar siswa dan lulusannya memiliki kesadaran antar budaya, partisipasi sosial, memiliki pengalaman transformatif, pembelajaran kolaboratif (agar siap berkerja dengan orang-orang berbeda budaya, untuk memecahkan masalah yang kompleks dan multidisipliner, serta memiliki kesadaran global (Daquila, 2013). Di Singapura terdapat peraturan Inggris berupa dua alat budaya sebagai solusi untuk hidup damai dan harmoni dalam keberagaman. Kedua alat budaya ini terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di Singapura. Yang pertama adalah aturan kekaisaran dan lembaganya ditopang oleh hukum Inggris dengan sistem yang mengatur berbagai urusan masyarakat. Sistem ini sangat diperlukan bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik kita, dan berfungsi sebagai rel dalam hidup ke sistem ekonomi global. Alat budaya yang kedua adalah bahasa Inggris sebagai bahasa umum dari semua komunitas, sementara pada saat yang sama setiap komunitas tetap diberi kebebasan untuk mempertahankan bahasa dan dialeknya sendiri. Sesuai dengan Konstitusi Republik Singapura, bahasa Melayu yang diakui sebagai bahasa nasional Singapura tapi bahasa Inggris adalah bahasa pemerintahan, sistem administrasi, perdagangan, dan bahasa yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat Singapura (Keong, 2013).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai negara multietnik, pendidikan kewarganegaraan di Singapura juga berperan dalam mendukung keharmonisan dalam keberagaman serta berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat (Keong, 2013; Baildon et al., 2016). Weninger & Kho (2014) menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Singapura merupakan bentuk pembelajaran yang partisipatif. Pendidikan kewarganegaraan menempatkan negara sebelum kelompok etnik, hal ini bertujuan untuk mengontrol masyarakat dengan berbagai keragamannya dalam kehidupan berbangsa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat harmonis di Malaysia dan di Singapura. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, disiplin sosial, demokratis dan bela negara. Di tengah keberagaman yang terdapat di Malaysia dan di Singapura, Pendidikan Kewarganegaraan bertanggungjawab untuk mendukung terbentuknya masyarakat rukun dan damai yang turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

SIMPULAN

Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang bersifat multietnik. Kedua negara ini sama-sama memiliki tiga etnis utama yaitu Melayu, Cina dan India. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam kebijakan pengelolaan keanekaragaman budaya di Malaysia dan di Singapura. Di Malaysia, dalam pengelolaan keragaman budaya mencerminkan isu-isu inti yang penting bagi masing-masing daerah, meskipun memiliki masa lalu yang sama. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia terkait dengan politik etnis didasarkan pada identitas etnis yang berkaitan dengan politik perbedaan. Di Malaysia terdapat pelabelan etnis Melayu, Cina, dan India, dan kategori politik pribumi dan non-pribumi. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan bentuk-bentuk kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan antarkelompok di Malaysia digolongkan dalam keyakinan zero-sum dimana Melayu dominan lebih didukung dengan mengorbankan etnis yang tidak dominan. Terdapat hak istimewa khusus bagi kelompok pribumi yang tersedia melalui program tindakan afirmatif.

Berbeda dengan model Malaysia, kebijakan sosial di Singapura dalam pengelolaan keberagaman budaya tidak diformulasikan dengan zero-sum. Setiap perbedaan justru harus dipertahankan. Agar tercipta keharmonisan, multikulturalisme Singapura lebih menekankan pada kemandirian, keadilan dan kesetaraan. Di Singapura, wacana keanekaragaman budaya tidak lagi berpusat di ranah identitas rasial namun bagaimana masuknya imigran berpotensi mengubah struktur budaya bangsa.

Walau terdapat perbedaan dalam pengelolaan keberagaman budaya di Malaysia dan Singapura, kedua negara ini sama-sama mengandalkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural yang bertanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, patriotik serta turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

REFERENSI

- Baildon, M., Baildon, M., Sim, J. B., & Paculdar, A. (2016). A tale of two countries: comparing civic education in the Philippines and Singapore, *46*(1), 93–115. <https://doi.org/10.1080/03057925.2014.940848>
- Balakrishnan, V. (2015). Rebirth of Civics and Citizenship Education in Malaysia. *Masalah Pendidikan Jilid 27*, (October).
- Bandu, S. H., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2017). Element of Citizenship in Education System in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *7*(3 . ISSN: 2222-6990), 836–841. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i3/2852>
- Changsong, W., & Yiming, C. (2017). The Ideological Struggle of Multicultural Nationalism: Cultural Identity in the 2014 Malaysian Top-Grossing Movie The Journey. *SHS Web of Conferences*, *2*(ISSN: 2261-2424).
- Daquila, T. C. (2013). Internationalizing Higher Education in Singapore: Government Policies and the NUS Experience. *Journal of Studies in International Education*, *17*(5), 629–647. <https://doi.org/10.1177/1028315313499232>
- Daud, C. R. M. (2016). The Integration Of Education In Multiracial And Multi-Cultural Society. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, *17*(1), 38–53.
- Keong, C. S. (2013). Multiculturalism in Singapore. The Way to Harmonious Society. *Singapore Academi of Law Journal*, (25 SAclJ), 84–109.
- Mun, C. Y. (2013). Ethnic Socialization: A Case of Malaysian Malay and Chinese Public Universities Students Experiences. *International Journal of Social Science and Humanity*, *3*(6), 582–585. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2013.V3.307>
- Noor, N. M., & Leong, C. (2013). Multiculture in Malaysia and Singapore: Contesting Models. *International Journal of Intercultural Relations*, *37*(6), 714–726. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.009>
- Nordin, A. B., Alias, N., & Siraj, S. (2013). National Integration in Multicultural School Setting In Malaysia. *The Malaysian Online Journal of Educational Science Volume*, *1*(1), 20–29.
- Triyono, S. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural di MTs Al Hamid Banjarmasin. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, *1*(1. E-ISSN : 2580-7056, ISSN : 2580-7064), 90–104.
- Weninger, C., & Kho, E. M. (2014). The (bio)politics of engagement: shifts in Singapore's policy and public discourse on civics education. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/01596306.2013.871231>
- Yusof, D. M., Zakariya, H., & Shahdan, A. (2014). Higher Education and Civic Development in Malaysia. *Proceedings Of Socioint14- International Conference on Social Sciences and umanities.8-10 September 2014- Istanbul, Turkey ISBN: 978-605-64453-1-6*, 604–611.
- Yusof, N. M., Abdullah, A. C., & Ahmad, N. (2014). Multicultural Education Practices in Malaysian Preschools with Multiethnic or Monoethnic Environment. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, *1*(1), 12–23.